

**Pokok-pokok
dalam Revisi UU BUMN**

1. Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN adalah Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

2. Kepemilikan saham Seri A dwiwarna 1% oleh negara pada BP BUMN.

3. Penataan komposisi saham pada perusahaan induk Holding Investasi dan perusahaan induk Holding operasional pada Badan Pengelola Investasi Danantara

4. Pengaturan terkait larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi komisaris dan dewan pengawas BUMN.

5. Menghapus ketentuan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.

6. Penataan posisi dewan komisaris pada Holding Investasi, Holding Operasional yang diisi oleh kalangan profesional.

7. Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh BPK dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMN.

8. Menambah kewenangan peran BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN.

9. Penegakan kesetaraan gender bagi karyawan BUMN menduduki jabatan direksi komisaris dan jabatan manajerial di BUMN.

10. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding operasional, holding investasi, atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah.

11. Mengatur pengecualian pengurusan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BP BUMN.

12. Pengaturan mekanisme peralihan status kepegawaian dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN. Kemudian, pengaturan substansi lainnya.

**TOK, KEMENTERIAN BUMN
JADI BADAN PENGATURAN**

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi bagian dari Pemerintahan sejak 1998 lalu pada masa kepemimpinan Presiden BJ Habibie akhirnya berubah menjadi Badan Pengaturan BUMN. Perubahan itu terjadi ketika Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui (mengesahkan) revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) pada Kamis (2/10/2025). Revisi ini mengatur perubahan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN. Tahun ini DPR bersama pemerintah dua kali merevisi Undang-Undang BUMN. Revisi undang-undang itu masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Padahal, UU BUMN baru saja direvisi dan disahkan pada 24 Februari 2025. Kemudian, revisi keempat Undang-Undang BUMN mulai berjalan setelah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Presiden Prabowo Subianto tercatat mengirim surat ke DPR untuk merevisi Undang-Undang BUMN setelah menggeser Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Revisi UU BUMN ini melarang rangkap jabatan bagi menteri atau wakil menteri di direksi, komisaris, dan dewan pengawas BP BUMN. Kemudian dividen saham seri A dwiwarna dikelola langsung oleh BP BUMN atas persetujuan presiden. Revisi ini juga menghapus ketentuan anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas bukan penyelenggaraan negara. Selanjutnya tim juga mengatur kewenangan pemeriksaan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BACA HAL 11...

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima laporan terkait RUU BUMN dari Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma dalam Rapat Paripurna DPR RI.

MENKEU : MBG SALAH SATU PILAR DARI SUMITRONOMICS

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu pilar dari ekonomi Sumitronomics di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga dia memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap keberhasilan program tersebut. Dia juga akan mengalihkan anggaran MBG jika tidak terserap maksimal sampai Desember nanti.



Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Bloomberg)

Purbaya mengatakan bahwa Sumitronomics saat ini sebagai konsep pembangunan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi menuju 8%. Konsep tersebut merupakan gagasan ekonom Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo, yang juga merupakan ayah kandung dari Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menjelaskan bahwa Sumitronomics berfokus pada tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.

Pernyataan itu ia utarakan saat ditanyai soal program MBG yang telah mengambil porsi anggaran negara cukup besar tetapi saat ini tengah menghadapi polemik dan hambatan dalam proses pelaksanaannya.

Belakangan, program MBG sendiri memang terus menemui sejumlah permasalahan, meliputi berbagai kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di Indonesia yang menyantap menu olahan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Itu bukan program populis. Itu salah satu kaki dari tiga kaki Sumitronomics," ujar Purbaya dilansir dari Bloomberg Technoz Kamis (2/10/2025).

Dia menambahkan bahwa MBG bukan program sembarangan. Sehingga dia menekankan supaya program tersebut tetap jalan dan yang penting memastikan berjalan dengan baik.

Purbaya memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap keberhasilan program tersebut. Jika berhasil, program MBG dapat menjadi salah satu penopang target pertumbuhan ekonomi jika dijalankan dengan optimal.

"Untuk program MBG, kita akan monitor sampai akhir Oktober, gimana [penyerapannya]?, Bisa nggak sampai Desember? Kalau nggak, kita potong, kita alihkan ke tempat yang lain," ujarnya.

Tak hanya itu, program itu juga saat ini terbilang masih minim penyerapan anggaran. Tetapi, justru tetap ditambahkan anggarannya dalam APBN 2026 mendatang menjadi Rp335 triliun.

Pada hal sepanjang tahun ini, penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis baru Rp13,2 triliun sampai Agustus 2025. Angka ini 18,6% dari total pagu awal Rp71 triliun. Jika dibandingkan total pagu outlook yang sebesar Rp171 triliun, persentase penyerapannya bahkan masih rendah.

Ekonom Universitas Indonesia, Vid Adrison, mengatakan program MBG harus dilakukan melalui mekanisme pemetaan mandiri (self targeting). Dimana keluarga siswa yang mendaftarkan diri agar jadi penerima MBG. Dengan demikian maka setiap pihak akan mendapatkan benefit dari pelaksanaan MBG. Pasalnya bagi masyarakat yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, mereka bisa mendapatkan makan dari MBG sedangkan bagi masyarakat yang sudah bisa mencukupi, mereka bisa memilih yang lain.

"Jadi itu concern kami terkait dengan crowding out dari dana Rp335 triliun ini, ini sangat-sangat besar," tegas Vid dilansir investor.id.

Bila pemerintah menjalankan

program MBG secara masif maka akan memberikan dampak negatif terhadap ketersediaan pangan di pasar. Sebab pasokan pangan akan teralihkan untuk program MBG. Imbasnya terjadi kelangkaan dan kenaikan harga di pasar.

"Bagi masyarakat miskin, ketika harga makanan naik, itu akan punya dampak yang sangat-sangat besar bagi biaya kehidupan mereka, sehingga bisa saja pemerintah harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk memberikan bantuan," kata Vid.

Dampak lain penerapan MBG adalah terjadinya kasus keracunan pada masyarakat penerima MBG dan lonjakan jumlah sampah makanan. Untuk menghasilkan makanan layak konsumsi maka butuh tempat penyimpanan hingga pengantaran makanan yang ideal. Hal tersebut membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia dan memakan biaya dalam jumlah besar.

"Silahkan dilihat waktu produksi MBG sampai akhirnya dikonsumsi. Hal itu membutuhkan cold storage, delivery unit yang baik, kemudian di sekolah juga harus disimpan dengan baik, sehingga akhirnya bisa dimakan dengan layak. Langkah ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar," tutur Vid.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan bahwa penyerapan anggaran MBG akan selesai. "Saya gak khawatir terkait dengan itu

(ancaman Menkeu Purbaya). Karena penyerapan kita insyaallah akan selesai, apalagi Rp71 triliun pasti terserap," tegasnya, Senin (22/9/2025) lalu.

Bahkan, Dadan memamerkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan anggaran tambahan sekitar Rp100 triliun untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis tahun ini.

Dadan menyebut BGN sejatinya hanya butuh tambahan sekitar Rp50 triliun di 2025. Sementara, Rp50 triliun sisanya sudah direlakan untuk program-program lain di luar MBG.

"Pak Presiden (Prabowo) sudah membuat stand by Rp100 triliun (anggaran tambahan MBG). Saya sudah sampaikan jauh hari ke pak presiden, kita tidak akan bisa menggunakan anggaran tambahan Rp100 triliun. Jadi, yang Rp50 triliun silakan digunakan untuk kepentingan lain. Kami sudah sampaikan itu dan pak presiden cukup kaget, 'Jadi, saya masih punya Rp50 triliun?'. 'Silakan pak untuk kegiatan lain'," cerita Dadan.

"Sekarang (realisasi penyerapan anggaran MBG) sudah hampir Rp17 triliun. Jadi, kami tidak risau yang gitu-gitu (ancaman Menkeu Purbaya) karena kami tahu apa yang harus kami lakukan," tambahnya.

Ia kemudian menyinggung soal anggaran BGN yang masih mendapatkan tanda bintang alias diblokir Kementerian Keuangan. Dadan menyebut ada sekitar Rp9,1 triliun anggaran badan tersebut yang belum bisa dipakai.

Purbaya yang baru menjabat pada Senin (8/9/2025) memang menaruh perhatian khusus terhadap kecepatan belanja pemerintah. Ia menegaskan bakal memelototi serapan anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang lelet.

Salah satu yang diadukan banyak pihak ke Purbaya adalah penyerapan anggaran MBG oleh Badan Gizi Nasional. Oleh karena itu, sang Bendahara Negara memberikan ultimatum khusus kepada Badan Gizi Nasional. (han,ist/lut)



"Itu bukan program populis. Itu salah satu kaki dari tiga kaki Sumitronomics. Untuk program MBG, kita akan monitor sampai akhir Oktober, gimana [penyerapannya]?, Bisa nggak sampai Desember? Kalau nggak, kita potong, kita alihkan ke tempat yang lain,"

**PURBAYA
YUDHI SADEWA**

Menteri Keuangan

MENTERI HUKUM SAHKAN KEPENGURUSAN PPP MARDIONO

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Muhammad Mardiono. Supratman saat berada di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025), mengatakan kalau surat keputusan tersebut telah ditandatangani Rabu (1/10/2025).

Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhamad Mardiono, setelah pembukaan Muktamar X, di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025). Tempo

Dia mengatakan bahwa Mardiono mendaftarkan kepengurusan PPP ke Kementerian Hukum pada 30 September 2025. "Kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono. Kemudian, apakah sudah diambil? Saya belum tahu karena saya serahkan kepada teman-teman di Kementerian Hukum untuk menyerahkannya, yang jelas saya sudah tandatangani kepengurusan itu," ucapnya dilansir republika.

Supratman menjelaskan sebelum menandatangani SK kepengurusan PPP kubu Mardiono, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) telah melakukan penelitian. "Setelah dilakukan penelitian, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana menggunakan anggaran dasar dan rumah tangga hasil Muktamar Ke-9 di Makassar lalu dan itu tidak berubah," kata dia.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai kubu Agus Suparmanto yang juga mendaftarkan kepengurusan PPP ke Kementerian Hukum pada Rabu (1/10/2025), Supratman mengaku belum mengetahuinya.

"Saya belum tahu karena saya tidak pernah bertemu. Jadi, yang pasti bahwa intinya, surat keputusan Menteri Hukum tentang pengesahan kepengurusan hasil muktamar PPP, itu sudah saya sudah tandatangani kemarin sekitar jam 10 atau 11," ujarnya.

Sementara itu, DPW PPP Jawa Barat menolak pengesahan kepengurusan PPP dengan Ketua Umum Mardiono setelah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas resmi menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PPP hasil MuktamarXPPP.

Plt Ketua DPW PPP Jabar Pepep Saeful Hidayat menegaskan, secara jelas hasil Muktamar X yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu melahirkan keputusan dimana Agus Suparmanto adalah Ketua Umum terpilih untuk periode 2025-2030.

"Saya yang mengalami proses

(muktamar) di dalam ya kaget atas keluar pernyataan bahwa SK Kementerian Hukum sudah ditandatangani dan tentu kita akan melakukan penolakan atas SK itu. Kita akan segera berkonsolidasi mengambil upaya apa yang dimungkinkan untuk melakukan penolakan atas SK tersebut," kata Pepep, Kamis (2/10/2025).

Pepep menjelaskan, pihaknya akan lebih dulu berkoordinasi untuk menentukan langkah penolakan tersebut. Menurutnya, kubu Agus Suparmanto akan menelaah upaya apa yang bisa diambil untuk menolak keputusan menteri hukum tersebut.

Pepep juga menyebut Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum terpilih telah mendaftarkan struktur kepengurusan PPP ke Kementerian Hukum pada Rabu, 1 Oktober kemarin.

"Tentu kita tidak bisa serta merta, kita harus berkoordinasi dengan semua pihak untuk menuntut rasa keadilan kami sebagai peserta di situ dan pihak Pak Agus Suparmanto sudah melakukan pendaftaran dan keluarnya SK ini kita akan melihat upaya-upaya apa yang tersedia untuk melakukan penolakan," jelasnya.

"Sudah kemarin, kita sudah daftar kemarin hari Rabu melakukan pendaftaran dan pendaftaran kami didasari oleh pernyataan mahkamah partai," sambungnya.

Di sisi lain, Pepep meminta seluruh kader PPP di Jabar untuk tidak terpengaruh dengan dinamika yang sedang terjadi. Dia mengharapkan seluruh kader agar fokus dalam menjalankan tugas dan memberi pelayanan kepada masyarakat.

"Akan segera dikordinasikan di Jabar karena bagaimanapun persoalan ini urusan Jakarta (pusat), kita tidak ingin mengganggu konsentrasi teman-teman di daerah untuk melakukan kerja politik dan pelayanan kepada masyarakat atas isu ini," ujar Pepep detik.

Untuk diketahui uhamad Mardiono merupakan mantan Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP yang mengklaim kemenangan dalam Muktamar ke-10 pada 27 September

2025. Saat itu, muktamar berlangsung ricuh saat pimpinan sidang baru memulai rapat paripurna. Pendukung Agus Suparmanto menolak Muhamad Mardiono dan menyatakan partai butuh ketua umum baru. Sementara kubu Mardiono berkuuh melanjutkan kepemimpinannya.

Pendukung Mardiono dan Agus saling adu mulut, adu pukul, hingga melempar kursi. Pimpinan sidang, Amir Uskara, tiba-tiba mempercepat pelaksanaan muktamar. Ia bergegas meminta persetujuan peserta muktamar untuk memilih Mardiono sebagai ketua umum secara aklamasi.

Meski terjadi penolakan sebagian peserta, Amir tetap mengetuk palu sidang tanda persetujuan. Setelah itu, ia dan para pendukung Mardiono meninggalkan ruangan sidang. Malam harinya, kubu Mardiono menggelar konferensi pers untuk menginformasikan hasil muktamar.

Sementara itu, Kubu Agus Suparmanto menentangnya. Mereka tetap melanjutkan sidang muktamar hingga memilih Agus sebagai pucuk pimpinan PPP periode 2025-2030. Kubu Agus mengklaim proses muktamar yang mereka lakukan sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

PPP menggelar muktamar partai yang ke-10 di kawasan Ancol, Jakarta, akhir pekan lalu. Pada Sabtu (27/9/2025) malam, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengklaim dirinya terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum definitif periode 2025-2030.

Namun, Muktamar yang sempat diwarnai keriuhan itu tetap berlangsung dan memutuskan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto sebagai ketua umum. Dengan demikian, ada dua pihak yang menyatakan diri sebagai Ketua Umum PPP Periode 2025-2030 berdasarkan keputusan Muktamar Ke-10 PPP, yakni kubu Mardiono dan Agus Suparmanto.

Kubu kepemimpinan Agus Suparmanto menunggu pihak Mardiono untuk bergabung. "Kami ingin beliau gabung dengan kami di

pengurusan, di Partai Persatuan Pembangunan untuk menyongsong pemilu yang akan datang," kata Sekretaris Jenderal PPP Taj Yasin Maimoen di kantor Kementerian Hukum, pada Rabu (1/10/2025).

Kemarin, Taj Yasin mewakili Agus Suparmanto yang berhalangan hadir. Ia menuturkan, kubu Agus telah mengutus perwakilan untuk mendatangi Mardiono. Menurut Taj Yasin, langkah rekonsiliasi terbuka untuk mendorong peluang PPP bisa kembali mendapatkan jatah kursi Dewan Perwakilan Rakyat. "Kami wujudkan bahwa PPP harus masuk parlemen itu yang penting," tutur dia. (han,ist/lut)



Kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono. Kemudian, apakah sudah diambil? Saya belum tahu karena saya serahkan kepada teman-teman di Kementerian Hukum untuk menyerahkannya, yang jelas saya sudah tandatangani kepengurusan itu,"

**Supratman
Andi Agtas**

Menteri Hukum

Hari ke-4 Evakuasi Korban Musala Ponpes Ambruk di Sidoarjo PAKAI ALAT BERAT, 5 MENINGGAL DAN 59 MASIH HILANG

Proses evakuasi masih terus dilakukan di Ponpes Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur..Hingga hari ke-4, tim gabungan berhasil mengevakuasi 108 orang, lima di antaranya meninggal dunia. Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyebut, penggunaan alat berat untuk evakuasi korban ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, atas izin semua wali santri.

Kepala BNPB, Letjen Suharyanto juga menyatakan berdasarkan data yang ada 59 orang masih dinyatakan hilang.Sementara 103 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Memasuki hari keempat pencarian korban ambruknya bangunan Ponpes di Sidoarjo, penggunaan alat berat untuk proses evakuasi mulai dilakukan.

Hal ini diungkap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno usai keluarga santri menyetujui penggunaan alat berat.

Penggunaan alat berat untuk proses evakuasi disebutkan Menko PMK Pratikno dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh keluarga korban santri.

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyebut, penggunaan alat berat untuk evakuasi korban ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, atas izin semua wali santri. Khofifah mengatakan sempat bertemu seluruh wali santri yang keluarganya belum ditemukan di reruntuhan Ponpes Al Khoziny. Lalu, mereka sekuat menggunakan alat berat.

"Setelah semua wali santri setuju. Jadi bukan suara mayoritas, semua wali santri setuju bahwa proses pengangkatan puing dimulai," kata Khofifah di RSI Siti Hajar, Sidoarjo, Kamis (2/10/2025).

Kemudian, kata Khofifah, crane atau pemindah material berat mulai digunakan sekitar pukul 13.00 WIB. Alat tersebut dioperasikan tenaga profesional dalam evakuasi korban.

"Mulai bakda dzuhur tadi sudah pengangkatan puing-puing itu, semua di dalam koordinasi tim yang sangat profesional. Jadi pergerakan itu harus dalam proses mitigasi dan antisipasi yang perfect," ucapnya.

Selain itu, Khofifah mengungkapkan ada pakar yang menghitung berat beton yang diangkat menggunakan crane. Sebab, dikhawatirkan mengenai korban yang ada di reruntuhan.

"Menurut tim dari ITS 1 ton diambil, nanti dipotong lagi 1 ton, tadi kayu-kayu didahulukan, tapi semua tetap dalam kehati-hatian, dalam



Alat berat berupa crane mulai bekerja untuk mengangkat balok-balok yang runtuh pada Kamis (2/10/2025).-ist

mitigasi yang terukur kira-kira gitu," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Tim SAR Gabungan mulai mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi korban reruntuhan mushala Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Keputusan tersebut dilakukan

setelah rapat koordinasi petugas SAR gabungan dan berdialog dengan keluarga korban yang masih menunggu kabar anak-anaknya di posko.

"Jadi mereka (keluarga korban) memutuskan agar kami aparat mengevakuasi menggunakan alat

berat," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, Kamis (2/10/2025).

Perasaan sedih tergambar dari raut wajah keluarga. Tetapi, mereka juga tak menuntut korban ditemukan petugas dalam keadaan bernyawa. "Dan untuk memperkuat, kami membuat berita acara yang ditandatangani oleh wakil dari warga masyarakat yang ada keluarganya di situ. Ini juga menjaga bahwa kami tidak bertindak sesuai keinginan sendiri," ungkapnya.

Runtuhnya bangunan tiga lantai dan musala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo. Petugas mengungkap ada tujuh korban yang masih dalam keadaan terimpit reruntuhan di lantai dasar sektor A2, Kamis (2/10/2025).

Korban terhimpit itu diduga memiliki status hitam (tidak ada tanda kehidupan). Petugas Tim SAR sedang berupaya mencari dan mengevakuasi seluruh korban dengan menggunakan dukungan alat berat, seperti Crane.

Kasubdit RPDO (Pengarahan dan Pengendalian Operasi) Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia (KMM) Basarnas, Emi Freezer, mengatakan tujuh korban tersebut kondisinya terhimpit balok besar.

"Tujuh orang yang ada di sektor A2 posisinya berada di lantai dasar. Dan itu posisinya di bawah himpitan balok besar. Tidak bisa dievakuasi, kalau tidak struktur atas ini diangkat (menggunakan alat berat)," kata Emi Freezer di Posko Pencarian, Kamis (2/10/2025).(wid,rls,ant/dya)

Polda Jatim Ambil DNA Keluarga Korban Pondok Al Khoziny



Petugas dari Biddokkes Polda Jatim mengambil sampel keluarga korban bangunan yang ambruk di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025). (Antara)

Bid Dokkes Polda Jatim melakukan pengumpulan sampel DNA dari keluarga korban yang masih belum ditemukan di dalam reruntuhan bangunan milik Lembaga Pesantren Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (2/10/2025).

"Hari ini tanggal 2 Oktober 2025, kami mulai kumpulkan DNA dari keluarga dekat yang melaporkan ke posko Ante Mortem Polda Jatim," ujar Kabid Dokkes Polda Jatim Kombes. Pol. M. Khusnan.

Di lokasi posko Ante Mortem, Bid

Dokkes Polda Jatim juga membuka WhatsApp Group bagi keluarga korban. Tujuannya melalui WAG ini segala komunikasi dan informasi terkait perkembangan data identifikasi korban reruntuhan bangunan di Ponpes Al Khoziny dapat efektif.

Kombes. Pol. M. Khusnan menyampaikan pengumpulan sampel DNA dilakukan dengan

pengambilan swab mukosa mulut. Pengambilan sampel lapisan selaput lendir (mukosa) dari bagian dalam mulut, seperti dinding pipi, untuk pemeriksaan DNA atau pencocokan data identifikasi korban dalam pemeriksaan terhadap jenazah yang nantinya ditemukan dalam proses evakuasi.

"Pengambilan sampel DNA korban kita ambil dari keluarga terdekat. Orang tua atau saudara kandung. Dengan menggunakan DNA

dari keluarga kandung, tim DVI dapat membuat profil DNA pembanding untuk dicocokkan dengan sampel dari jenazah yang susah teridentifikasi," terang Kombes. Pol. M. Khusnan.

Tes DNA dilakukan untuk mempercepat proses identifikasi korban, yang masih terjebak di reruntuhan bangunan ambruk. Hasil tes dna wali santri ini akan dicocokkan dengan DNA korban.

Para keluarga santri tersebut rata-rata sudah pasrah, meskipun dalam hati mereka merasa berat kehilangan orang yang dicintai. Mereka kini tinggal menunggu proses evakuasi para korban dengan menggunakan peralatan berat.

Ainun Naim, 55, wali santri dari M Ibrahim Al Aqil, 14, asal Jember, sudah pasrah dengan musibah ini. Dia sudah mengikhlaskan anaknya apabila dipanggil Yang Maha Kuasa.

"Sudah ikhlas, pihak pesantren juga sudah minta maaf," kata Ainun Naim.(wid,ist,ant/dya)

Status Kondisi Khusus Radiasi di Cikande

RISIKO MAKAN UDANG TERCEMAR RADIONUKLIDA YANG DIKLAIM ZULHAS AMAN

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyebut sebagian udang yang terpapar radioaktif Cesium-137 (Cs-137) masih aman dikonsumsi karena kadarnya berada di bawah ambang batas. Pendapat berbeda diungkapkan epidemiolog. Meski paparan rendah tapi jika terus-menerus bisa meningkatkan risiko kanker, termasuk leukemia, kanker tiroid, payudara, saluran cerna, dan paru-paru.

Epidemiolog Dicky Budiman memperingatkan risiko kesehatan dari paparan radiasi radionuklida Cs-137 di Kawasan Industri Cikande.

"Paparan rendah tapi terus-menerus bisa meningkatkan risiko kanker, termasuk leukemia, kanker tiroid, payudara, saluran cerna, dan paru-paru. Paparan sedang bisa menimbulkan gejala ringan seperti kelelahan, gangguan darah, dan imunitas menurun. Sementara paparan tinggi bisa menyebabkan sindrom radiasi akut, termasuk kerusakan sumsum tulang yang berpotensi fatal," kata Dicky dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).

Dari hasil pemeriksaan kesehatan terhadap 1.562 pekerja dan warga sekitar, sembilan orang dipastikan terkontaminasi. Mereka menjalani uji whole body counting (WBC) dan langsung diberikan obat prussian blue oleh Puskesmas Cikande untuk mengeluarkan zat radioaktif dari tubuh.

Ia menekankan kontaminasi lingkungan dan produk pangan bisa menjadi jalur bioakumulasi yang berbahaya jika tidak segera ditangani.

"Meskipun dibandingkan Chernobyl atau Fukushima dampaknya lebih ringan, paparan kronis tetap berisiko dan dapat masuk ke rantai makanan," ujarnya.

Meski demikian sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa udang beku yang ditolak oleh Amerika Serikat (AS) lantaran terkontaminasi material radioaktif Cesium-137 masih aman untuk dikonsumsi.

"Yang sudah kembali (udangnya) ada beberapa yang kandungannya sangat minimum, hanya 68. Jadi yang itu silakan boleh dimakan karena ambang batas atas kita 500, sementara yang kemarin hanya 68," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Zulkifli Hasan juga menekankan Pemerintah Indonesia terus mengutamakan keamanan pangan, sekaligus mengamankan industri udang Indonesia, melindungi kesehatan

masyarakat, dan menjaga kepercayaan dunia terhadap produk Indonesia.

"Pemerintah memastikan pengawasan mutu hasil perikanan tetap dan telah berjalan sesuai standar nasional dan internasional," ungkapnya lebih lanjut.

Hasil investigasi satgas memastikan kontaminasi Cs-137 hanya terjadi di Cikande, tidak pada rantai pasok nasional dan ekspor.

"Oleh karena itu, hari ini kita menetapkan Cikande sebagai status kejadian khusus radiasi radionuklida Cs-137," tuturnya. Satgas telah melakukan dekontaminasi terkait hal ini.

Ambang di RI 500 Becquerel/Kg

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyebut sebagian udang



Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup menyegel area yang mengandung radioaktif Cesium-137 di sebuah pabrik di Cikande, Kabupaten Serang, Banten, bulan lalu. (Dok-KLH).

yang terpapar radioaktif Cesium-137 (Cs-137) masih aman dikonsumsi karena kadarnya berada di bawah ambang batas.

Produk udang tersebut diketahui merupakan ekspor dari PT BMS yang ditolak masuk Amerika Serikat setelah terdeteksi mengandung radiasi.

Dalam keterangannya, Zulhas mengatakan, kadar radiasi pada sejumlah udang yang dikembalikan masih sangat rendah.

"Ternyata yang sudah kembali (udangnya) ada beberapa yang sangat minimum 68 (kadar radiasinya). Jadi

yang itu jelas silakan boleh dimakan, standar kita 500," ujarnya di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap akan memusnahkan udang apabila terbukti memiliki kadar radiasi di atas ambang batas nasional. "Kalau yang di atas 500 kita musnahkan. Kalau Amerika (ambang bakunya) 1.200, kita 500. Jadi yang di atas ambang baku kita musnahkan, tapi yang di bawah ambang baku layak untuk dikonsumsi, kira-kira itu," tambah Zulhas. (wid,rls,kcm/dya)

Terbaru, FDA Temukan Radioaktif Cs-137 di Cengkih Indonesia

REGULATOR Federal Amerika Serikat (AS) mendeteksi kemungkinan kontaminasi radioaktif pada produk makanan kedua yang dikirim ke AS dari Indonesia. Penemuan terbaru ini terjadi saat penarikan kembali (recall) udang yang berpotensi tercemar terus bertambah.

Dikutip dari laman US Food and Drug Administration (FDA), pihaknya memblokir impor semua rempah-rempah dari PT NJS di Indonesia setelah inspektur federal mendeteksi Cesium-137 dalam kiriman cengkih yang dikirim ke California.

Penemuan ini menyusul peringatan impor yang diberlakukan pada Agustus terhadap perusahaan PT Bahari Makmuri Sejati (BMS foods), yang mengirimkan jutaan kilogram udang ke AS setiap tahun.

Saat ini, masih belum jelas apakah ada sumber kontaminasi yang sama untuk udang dan rempah-rempah tersebut. FDA dan CBP mengatakan penyelidikan mereka terus berlanjut, terutama karena kedua fasilitas pengolahan tersebut berjarak sekitar 800 kilometer di Indonesia.

Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menyatakan bahwa besi tua atau logam cair yang terkontaminasi di lokasi industri dekat pabrik pengolahan udang di Indonesia kemungkinan merupakan sumber bahan radioaktif. Badan pengawas nuklir di Indonesia menyatakan bahwa mereka mendeteksi isotop radioaktif di lokasi tersebut di luar Jakarta.

Pakar kedokteran nuklir di Georgia Institute of Technology Steve

Biegalski, mengatakan bahwa kontaminasi semacam itu bisa berasal dari daur ulang peralatan medis lama yang mengandung Cesium-137. Selain itu, kontainer transportasi atau metode pengiriman yang terkontaminasi (seperti truk, kapal, atau bahan bersama) juga bisa menjadi sumbernya.

Kontaminasi jenis ini kemungkinan berasal dari daur ulang peralatan medis lama yang mengandung cesium 137," kata Steve Biegalski.

Terpisah, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar menekankan tengah berkoordinasi dengan otoritas pengawasan pangan dan obat di Amerika Serikat terkait cengkih mengandung zat radioaktif. (wid,rls,dtc/dya)

Dampak Kericuhan Agustus: Investasi hingga Okupansi Hotel di Kota Malang Turun

MALANG - Gelombang aksi demonstrasi yang berujung kericuhan pada akhir Agustus 2025 lalu meninggalkan jejak bagi Kota Malang.

Tidak hanya membuat aktivitas pelayanan publik sempat terhenti, kericuhan tersebut juga berdampak pada iklim investasi dan sektor pariwisata, khususnya tingkat penghunian kamar (TPK) hotel.

"Kemarin itu sudah kami sampaikan waktu kami hearing dengan Komisi A. Bahwa isu demo akhir Agustus kemarin itu benar-benar membuat 2 minggu tidak ada orang mengurus (perizinan) apapun. Jadi (iklim investasi) macet total kemarin itu," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, Kamis (2/10/2025).

Padahal, lanjut Arif, sesuai dengan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, target investasi Kota Malang tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp3,1 triliun. Angka tersebut menjadi indikator iklim investasi di Kota Malang sejatinya masih dipercaya oleh para pengusaha.

Namun, gejala sosial di akhir

Agustus lalu membuat banyak pengusaha memilih menunda langkah investasi mereka. Kekhawatiran akan stabilitas keamanan menjadi alasan utama mereka mengambil sikap menunggu.

"Terkait dengan isu demo baik yang di Jakarta dan di sini juga, itu pengusaha nggenggam duitnya. Mungkin mereka mikirnya, kalau kami investasi kemudian chaos di Malang, bagaimana? Kan gitu," jelasnya.

Situasi stagnasi itu tidak hanya dirasakan di tingkat dinas perizinan. Tetapi juga di Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka Kota Malang.

Arif menyebut, pelayanan di sejumlah instansi ikut menurun drastis, termasuk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang biasanya paling ramai pemohon. "Biasanya di Disdukcapil itu paling banyak melayani. Tapi kemarin itu sepi," tuturnya.

Tak jauh berbeda, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, juga mencatat kericuhan demo akhir Agustus turut berimbas pada sektor pariwisata. Khususnya tingkat penghunian kamar (TPK) hotel.

"TPK hotel pada Agustus 2025 sebesar 50,15 persen. Atau turun 1,65 poin dibanding Juli 2025 sebesar 51,80 persen. Adanya demo berpengaruh terhadap TPK, meski pada Agustus ada beberapa event di Kota Malang," kata Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin.

Secara rinci, Umar menyebutkan, TPK hotel bintang pada Agustus tercatat 60,87 persen, menurun 1,67 poin dibanding Juli yang mencapai 62,54 persen. Sementara TPK hotel non bintang juga turun 1,67 poin, dari 38,67 persen pada Juli menjadi 37,00 persen di Agustus 2025.

Penurunan itu kontras dengan capaian bulan Juli yang relatif tinggi karena adanya Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025. "Juli memang tinggi salah satunya ada event Porprov, apalagi sewaktu awal bulan itu sedang ramai-ramainya," ujarnya.

Ilustrasi: Salah satu kawasan investasi di Kota Malang, Kayutangan Heritage pada 1 September 2025, nampak lengang pasca kericuhan akhir Agustus 2025 lalu. (Santi/Lentera)



BPS juga melaporkan rata-rata lama tamu menginap (RLTM) di Kota Malang selama Agustus 2025. Untuk hotel bintang mencapai 1,54 hari, sedangkan di hotel non bintang sebesar 1,22 hari.

"Secara keseluruhan, rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang dan non bintang berada di angka 1,41 hari," paparnya. (Santi/Dya)

Dana TKD 2026 Turun Rp600 M, Belanja Pemkab Malang Diperketat



Kepala BKAD Kabupaten Malang, Yetty Nurhayati. (dok. Ist)

D a e r a h (B K A D) Kabupaten Malang, Yetty Nurhayati, mengatakan dana TKD tahun anggaran 2026 diproyeksikan senilai Rp2,9 triliun. Jumlah ini menurun dibandingkan proyeksi TKD dalam APBD Induk tahun anggaran (TA) 2025 yang mencapai Rp3,5 triliun.

"Ada penurunan, sekitar 17,14 persen. Dari Rp3,5 triliun menjadi Rp2,9 triliun. Tetapi ini asumsinya adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Malang tetap," ujar Yetty, Kamis (2/10/2025).

Yetty menjelaskan, pada tahun 2025, DBHCHT yang diterima Kabupaten Malang sebesar Rp158,9 miliar. Jika pada tahun 2026 jumlahnya sama, maka total TKD yang masuk memang berkurang sekitar 17,14 persen.

"Ya itu. Kalau jumlahnya sama, penurunannya sekitar 17,14 persen. Tetapi untuk besaran DBHCHT sendiri kami masih menunggu informasi dari Pemerintah Provinsi Jatim," tambahnya.

Lebih lanjut, Yetty memaparkan proyeksi TKD pada tahun anggaran 2026. Terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Rp179 miliar, DBH Sumber Daya Alam Rp15,5 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp1,5 triliun, DAK fisik Rp10 miliar, DAK nonfisik Rp767 miliar, Dana Desa Rp388 miliar, dan hibah daerah Rp9,2 miliar.

Disinggung soal dampaknya terhadap belanja daerah, Yetty mengakui penurunan TKD akan berimbas pada kebutuhan anggaran. Namun, ia menyebutkan detail belanja belum bisa dijelaskan saat ini karena Rancangan APBD (RAPBD) tahun 2026 masih dalam tahap penyusunan.

"Penyesuaian belanja sudah pasti. Namun sekarang masih belum bisa disampaikan. Karena RAPBD 2026 masih dibahas. Menunggu juga

persetujuan DPRD, karena semua hal terkait program wajib mendapat persetujuan dari DPRD," tegasnya.

Meski demikian, Yetty menegaskan Pemkab Malang akan tetap memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk diketahui, pada tahun 2025, alokasi DBHCHT sebesar Rp158,9 miliar dibagi ke beberapa pos. Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) dialokasikan Rp57,1 miliar, yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi buruh pabrik rokok, petani tembakau, dan buruh tani cengkeh. Dana juga dialokasikan untuk pembinaan industri dan peningkatan keterampilan.

Pos Kesehatan Masyarakat mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp96 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) di sejumlah RSUD Kabupaten Malang. Serta pembayaran tunggakan iuran Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) BPJS Kesehatan. (Santi/Dya)

SHUTDOWN AS, TRUMP BEKUKAN DANA RP 432 T UNTUK NEGARA BAGIAN DEMOKRAT

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump menahan anggaran senilai USD 26 miliar (sekitar Rp 432 triliun) yang ditujukan untuk negara bagian yang mayoritas dipimpin Partai Demokrat.

"Miliaran dolar dapat dihemat," kata Trump dalam ungghannya di Truth Social, dikutip dari Reuters, Kamis (2/10/2025).

Sebelumnya, Trump memperingatkan akan memanfaatkan government shutdown untuk menekan program-program unggulan Partai Demokrat, termasuk alokasi USD 18 miliar untuk proyek transportasi di New York dan USD 8 miliar untuk proyek energi hijau di 16 negara bagian yang dikuasai Demokrat, seperti California dan Illinois.

Government shutdown terjadi ketika sebagian besar layanan federal AS berhenti karena Kongres—baik DPR maupun Senat—gagal mengesahkan undang-undang anggaran sebelum berakhirnya tahun fiskal pada 30 September. Di DPR, RUU tersebut disetujui, tetapi terhenti di Senat, sementara Trump menuding Partai Demokrat sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Perpanjang PHK

Sementara itu, Wakil Presiden JD Vance memperingatkan bahwa pemerintah akan memperpanjang PHK pegawai federal jika shutdown berlangsung lebih dari beberapa hari.

Sekitar 750 ribu pegawai federal diperintahkan untuk tidak bekerja. Sementara yang lainnya seperti pasukan dan agen Patroli Perbatasan mulai bekerja tanpa dibayar. Kementerian Urusan Veteran mengatakan pihaknya akan menyediakan pemakaman di pemakaman nasional, tapi tidak akan memasang batu nisan atau memotong rumput.

Langkah Trump membekukan anggaran untuk negara bagian Demokrat itu menuai kecaman dari politisi Demokrat. Politisi Demokrat di DPR AS, Hakeem Jeffries, mengatakan pembekuan anggaran untuk proyek kereta bawah tanah dan pelabuhan di New York membuat ribuan orang akan kehilangan pekerjaannya.

Jeffries juga mengungkap tidak berkomunikasi dengan Gedung Putih sejak pertemuan dengan Trump pada awal pekan ini.

"Kami belum berkomunikasi dengan Gedung Putih sejak pertemuan di Gedung Putih pada Senin (29/9/2025)," katanya dalam



Presiden Donald Trump dan Senator Chuck Schumer (kanan). (Foto: AFP)

wawancara dengan CNN.

"Yang jelas, mereka ingin menutup pemerintahan," lanjutnya.

Senator Demokrat, Chuck Schumer, yang juga berasal dari New York, mengatakan Trump menargetkan rakyat Amerika biasa untuk tujuan partisan.

"Dia menggunakan rakyat Amerika

sebagai pion, mengancam akan menyakiti negara sebagai pemerasan," kata Schumer.

Selain itu, Senat AS kembali gagal menyetujui pendanaan pemerintah, karena RUU Partai Republik untuk membiayai pemerintah hingga 21 November dan usulan Demokrat yang menambahkan manfaat

kesehatan sama-sama ditolak. Meski Partai Republik memegang mayoritas 53-47, mereka membutuhkan dukungan minimal tujuh Demokrat untuk mencapai ambang 60 suara.

Pendanaan pemerintah sebesar \$1,7 triliun mencakup operasional lembaga, program kesehatan, pensiun, dan bunga utang. Kedua pihak saling menyalahkan menjelang pemilihan paruh waktu 2026, dengan Demokrat menuntut jaminan bahwa Trump tidak akan mengabaikan RUU pengeluaran. Klaim kedua belah pihak tentang cakupan asuransi kesehatan bagi imigran menuai kontroversi, sementara beberapa lembaga menuding "kaum kiri radikal" atas penutupan.

Penutupan pemerintah AS terlama sebelumnya berlangsung 35 hari pada 2018-2019 dan berakhir sebagian karena gangguan layanan pengontrol lalu lintas udara. (Reuters, ist/nei)

Hari Pertama, Layanan Publik dan Wisata Terhenti

PEMERINTAH federal AS memasuki masa penutupan pada hari Rabu (1/10/2025), menandai penutupan pertama dalam hampir tujuh tahun. Beberapa lokasi ikonik, termasuk Monumen Washington dan Gedung Capitol AS, ditutup untuk umum, sehingga menimbulkan kekecewaan dan kekhawatiran di kalangan pengunjung.

Di dasar Monumen Washington, Larae Anderson, yang melakukan perjalanan dari Arizona ke ibu kota AS bersama suami dan keempat anaknya, mengungkapkan bahwa mereka berencana mengunjungi puncak monumen, namun baru menyadari tempat itu ditutup saat tiba di pintu masuk.

"Kami agak terkejut kali ini karena mereka tidak bisa sepakat untuk tetap membuka pemerintahan," ujarnya kepada Xinhua, berharap kedua partai di Kongres dapat mengesampingkan perbedaan mereka dan "mengembalikan semuanya."

Di dekat Gedung Capitol AS, Pat dan suaminya dari Negara Bagian Washington mengunjungi Washington DC untuk pertama kalinya dan ingin masuk ke Gedung Capitol, namun penutupan pemerintah membuat rencana

mereka gagal, yang menurutnya cukup mengecewakan.

Meski begitu, sebagian besar museum di bawah Smithsonian Institution tetap buka menggunakan dana tahun fiskal sebelumnya, termasuk Kebun Binatang Nasional, hingga minimal 6 Oktober, sehingga pengunjung merasa lega. Namun, staf museum memperingatkan jika penutupan berlangsung lama, beberapa museum mungkin juga terpaksa tutup.

Dampak penutupan tidak hanya dirasakan sektor pariwisata. Menurut Brookings Institution, layanan publik lain turut terganggu, seperti keterlambatan pengurusan paspor, pinjaman usaha kecil, tunjangan pemerintah, penutupan pusat pengunjung dan toilet di taman nasional, serta berkurangnya inspeksi keamanan pangan.

Pegawai federal menghadapi dampak lebih serius. Mereka yang menangani "layanan penting", seperti pengatur lalu lintas udara dan aparat penegak hukum, tetap bekerja tanpa gaji, sementara ratusan ribu pegawai lainnya cuti tanpa bayaran hingga pendanaan dipulihkan. Pada penutupan pemerintah terlama 35 hari pada 2018-2019, banyak pegawai kesulitan secara finansial dan

bahkan mengandalkan bank makanan. Kantor Anggaran Kongres memperkirakan penutupan tersebut menimbulkan kerugian sekitar 3 miliar dolar AS bagi ekonomi negara.

"Saya pikir semakin lama ini berlangsung, semakin besar dampaknya," kata Pat, sambil berharap penutupan pemerintah ini tidak akan berlangsung lama.

Sementara itu, Partai Republik dan Demokrat terus saling menyalahkan, tanpa menunjukkan tanda-tanda kompromi. Pada hari Rabu (1/10/2025), Senat melakukan pemungutan suara atas dua RUU yang sama yang gagal disahkan pada Selasa malam satu dari Partai Demokrat dan satu dari Partai Republik dan keduanya gagal disahkan.

Pemimpin Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, mengatakan di platform media sosial X bahwa "Partai Republik menutup pemerintahan karena mereka tidak mau repot-repot melindungi layanan kesehatan bagi warga Amerika di seluruh negeri ini." Schumer kembali membantah klaim Partai Republik bahwa Partai Demokrat berusaha menyediakan layanan kesehatan bagi "imigran tanpa dokumen", dan menyebutnya sebagai "kebohongan." (Xinhua, ist/nei)

Benjolan Kecil yang Bisa Jadi Tumor Gusi

Anda mungkin pernah menjumpai benjolan kecil maupun besar di area gusi yang terasa mengganggu. Kondisi ini dikenal sebagai tumor gusi, yaitu pertumbuhan jaringan abnormal pada gusi yang bisa muncul di sekitar gigi atau rahang. Sebagian besar bersifat jinak, tetapi ada juga yang dapat berkembang menjadi ganas dan membahayakan kesehatan mulut maupun tubuh.

Tumor gusi sering tidak disadari hingga membesar atau menimbulkan nyeri, sehingga penting mengenali gejalanya sejak dini seperti benjolan menetap, gusi mudah berdarah, atau nyeri saat mengunyah agar dapat segera diperiksa dan ditangani dokter gigi untuk mencegah komplikasi.

Apa Itu Tumor Gusi?

Tumor gusi adalah pertumbuhan jaringan tidak normal pada area gusi yang dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti benjolan kecil, lunak, keras, atau bahkan mudah berdarah. Kondisi ini bisa timbul di sekitar gigi, langit-langit mulut, maupun di dekat tulang rahang, dan secara umum tumor gusi digolongkan menjadi dua jenis, yaitu jinak dan ganas.

Tumor gusi terbagi dua jenis: jinak, yang tidak menyebar tetapi bisa mengganggu fungsi mulut, dan ganas, yang berpotensi menjadi kanker mulut serta menyebar ke bagian tubuh lain sehingga membutuhkan penanganan serius.

Penyebab

Penyebab tumor gusi bisa berbeda-beda, mulai dari faktor lokal hingga sistemik.

Iritasi Kronis

Gigi palsu yang tidak pas atau kawat gigi yang menekan gusi dapat memicu iritasi dan peradangan, yang bila dibiarkan lama bisa menimbulkan pertumbuhan jaringan abnormal. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan rasa sakit, tetapi juga mengganggu fungsi mulut saat mengunyah, berbicara, maupun menjaga kebersihan.



Infeksi atau Peradangan

Infeksi gusi yang tidak ditangani dapat memicu benjolan menyerupai tumor akibat peradangan kronis yang merangsang pertumbuhan jaringan abnormal. Kondisi ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, mengganggu fungsi mulut, menyebabkan bau mulut, merusak jaringan gigi dan gusi, bahkan berdampak pada kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Kebersihan Mulut

Penumpukan plak dan karang gigi yang tidak dibersihkan dapat memicu peradangan gusi dan pertumbuhan jaringan abnormal menyerupai tumor. Meski umumnya jinak, benjolan ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman hingga kesulitan mengunyah, sehingga menjaga kebersihan gigi dan rutin memeriksakan diri ke dokter gigi sangat penting untuk mencegah komplikasi.

Faktor Genetik dan Hormonal

Wanita hamil memiliki risiko lebih tinggi mengalami pregnancy tumor pada gusi, yaitu benjolan jinak yang muncul akibat respons berlebihan jaringan gusi terhadap plak, iritasi, serta perubahan hormon selama kehamilan. Kondisi ini umumnya ditandai dengan gusi yang membengkak, mudah berdarah, dan terasa tidak nyaman, meskipun biasanya akan mengecil atau menghilang setelah melahirkan.

Paparan Tembakau dan Alkohol

Kedua faktor tersebut secara signifikan meningkatkan risiko munculnya tumor ganas di rongga mulut, termasuk pada area gusi, karena kebiasaan merokok dan konsumsi

alkohol jangka panjang dapat merusak jaringan, melemahkan sistem pertahanan alami mulut, serta memicu perubahan sel yang berujung pada kanker gusi.

Gejala

Tumor gusi bisa menimbulkan gejala yang berbeda tergantung jenisnya. Gejala tumor gusi dapat bervariasi, mulai dari munculnya benjolan pada gusi yang tidak kunjung hilang, gusi yang tampak bengkak, merah, atau mudah berdarah, hingga rasa nyeri atau ketidaknyamanan

saat mengunyah. Kondisi ini sering kali juga disertai bau mulut yang menetap serta gigi yang terasa goyang meskipun tidak terdapat karies. Pada kasus yang bersifat ganas, gejala dapat menjadi lebih serius, seperti penurunan berat badan tanpa sebab jelas, nyeri yang semakin parah, serta adanya luka pada gusi yang sulit sembuh.

Diagnosis

Diagnosis tumor gusi tidak bisa hanya berdasarkan pengamatan visual. Pemeriksaan gusi untuk mendeteksi adanya tumor umumnya

dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, pemeriksaan fisik mulut dilakukan untuk menilai bentuk, ukuran, dan tekstur benjolan atau tumor yang terlihat. Selanjutnya, dokter dapat merekomendasikan pemeriksaan penunjang berupa foto rontgen atau CT scan guna mengetahui sejauh mana tumor telah menyebar ke jaringan sekitar, termasuk tulang rahang. Untuk memastikan diagnosis, dilakukan Biopsi jaringan dengan mengambil sampel gusi dan memeriksanya di laboratorium menjadi standar emas untuk memastikan apakah tumor gusi jinak atau ganas.

Pengobatan

Pengobatan tumor gusi tergantung pada jenis dan tingkat keparahannya.

Pembedahan (eksisi)

Tumor jinak pada gusi umumnya ditangani dengan prosedur bedah kecil di klinik gigi, di mana dokter akan mengangkat jaringan abnormal tersebut agar tidak semakin membesar atau menimbulkan gangguan pada fungsi mulut. (nei,ist/dya)



Bunga Matahari Ditanam di Cikande untuk Serap Radiasi

Pemkab Serang berencana menanam bunga matahari di kawasan Cikande yang terpapar radiasi Cesium 137, karena tanaman ini dikenal mampu menyerap dan membersihkan limbah radioaktif dari lingkungan. Upaya ini bukan hal baru, sebab bunga matahari juga pernah digunakan secara massal setelah tragedi Chernobyl tahun 1986 sebagai salah satu langkah pemulihan lingkungan.

“Bunga matahari sangat pandai menyerap isotop radioaktif tertentu,” jelas ilmuwan tanah Michael Blaylock dilansir dari IFLscience.

Tanaman berwarna cerah ini tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga menyimpan biomassa di daun dan batang, sehingga mampu menyerap lalu membuang zat radioaktif tanpa

mencabut akarnya, seperti halnya bunga matahari dalam membersihkan lingkungan.

Fitoremediasi, yaitu pemanfaatan tanaman untuk membersihkan racun dari lingkungan, terbukti berhasil di Chernobyl, tempat bencana nuklir meninggalkan tanah dan air yang tercemar unsur radioaktif cesium serta strontium.

Keberhasilan proses ini terjadi karena isotop mampu “meniru” nutrisi yang secara alami diserap oleh bunga matahari. Dalam hal ini, cesium berperan menyerupai kalium, yaitu unsur yang sangat penting untuk mendukung proses fotosintesis, menjaga keseimbangan ion, serta membantu transportasi air dan nutrisi di dalam jaringan tanaman. Sementara itu, strontium meniru peran kalsium yang berfungsi bukan hanya

sebagai pemberi kekuatan struktural pada batang dan dinding sel tanaman, tetapi juga berperan dalam mengatur pertumbuhan sel, menjaga integritas jaringan, serta meningkatkan daya tahan tanaman terhadap tekanan lingkungan. Dengan cara inilah, bunga matahari mampu menyerap isotop berbahaya tersebut seolah-olah mereka adalah nutrisi alami, sehingga proses fitoremediasi dapat berlangsung secara efektif.

Awal Bunga Matahari Penghilang Radiasi

Dilansir dari UA magazine, banyak teknologi yang dikembangkan sejak kecelakaan Chernobyl pada tahun 1986 menggunakan mesin dan bahan kimia canggih; namun, beberapa perusahaan dan ilmuwan telah mengalihkan perhatian mereka kepada sahabat dan penolong tertua kita: tumbuhan.

Para ilmuwan telah menyelidiki spesies tumbuhan yang tidak dianggap untuk dikonsumsi untuk membantu menghilangkan radionuklida yang dilepaskan setelah kecelakaan nuklir. Proses ini disebut fitoremediasi.

Penggunaan fitoremediasi telah dimulai puluhan tahun yang lalu. Namun, dari ribuan tanaman yang dipertimbangkan, kultivar bunga matahari *Helianthus annuus* L telah dinyatakan sebagai pemenang yang jelas.

Pada tahun 1986, ahli biologi tanaman Ilya Raskin dan kelompok penelitiannya di Universitas Rutgers menemukan bahwa budidaya hidroponik spesies bunga matahari ini dengan cepat mengakumulasi logam berat dan radionuklida. Mereka

melakukan eksperimen dengan air yang terkontaminasi uranium di Ohio, dan melaporkan bahwa, setelah 24 jam, konsentrasi uranium dalam air menurun hingga 94%.

Pada tahun 1994, sebuah upaya multinasional berhasil menggunakan bunga matahari untuk membersihkan 137Cs dan strontium 90Sr dari air di Chernobyl, Ukraina. Ladang bunga matahari yang luas ditanam di area terdampak, sedekat satu kilometer dari reaktor nuklir yang rusak.

Menurut perusahaan Phytotech, fitoremediasi mengurangi biaya pembersihan hingga sepuluh persen dibandingkan dengan metode lain seperti perawatan kimia. Spesies bunga matahari *Helianthus annuus* L juga terbukti mampu menghilangkan logam beracun lainnya, seperti Cu^{2+} , Cd^{2+} , Ni^{2+} , Pb^{2+} , dan Zn^{2+} , dari larutan air secara efektif. Bunga matahari efektif di dalam air dalam eksperimen dan di Chernobyl, tetapi tidak demikian halnya di dalam tanah.

Para peneliti dari Universitas Purdue di AS menyelidiki fitoremediasi lain seperti mustard dan tembakau. Profesor botani Mary Alice Webb melakukan eksperimen dengan bibit tembakau untuk menyerap kalsium.

Secara mengejutkan, eksperimennya menunjukkan bahwa tembakau juga mampu menyerap isotop 90Sr, sehingga para peneliti menyadari bahwa tanaman ini berpotensi dimanfaatkan untuk membantu membersihkan tanah dari kontaminan nuklir berbahaya tersebut. Dalam mekanismenya, 90Sr bekerja dengan cara meniru kalsium yang secara alami mengalir ke dalam jaringan tanaman, sehingga tembakau tanpa sadar menyerap isotop tersebut layaknya unsur hara penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN “LENTERA TODAY”
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **TRENGGALEK:** TINA W I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

Jadi Ikon Wisata Baru, Jembatan 625 Meter Resmi Dibuka

China kembali mencetak rekor dunia dengan peresmian Huajiang Grand Canyon Bridge pada Minggu, (28/9/2025). Jembatan yang menjulang setinggi 625 meter di atas Sungai Beipan ini kini menjadi jembatan tertinggi di dunia.

Menurut laporan People, dengan panjang sekitar 1,4 kilometer, Huajiang Grand Canyon Bridge juga memegang rekor sebagai jembatan terpanjang di kawasan pegunungan.

Pembangunan jembatan yang memakan waktu hampir empat tahun ini langsung memberikan manfaat nyata. Waktu perjalanan melintasi ngarai yang sebelumnya memakan dua jam kini bisa dipangkas hanya menjadi dua menit saja.

Ikon Pariwisata Baru Guizhou

Tidak hanya mempermudah akses masyarakat, jembatan ini juga dirancang sebagai destinasi wisata. Berikut daftar wisata dan atraksi yang tersedia di Huajiang Grand Canyon Bridge:

Lift Wisata 207 Meter

Pengunjung dapat mencoba elevator raksasa setinggi 207 meter yang membawa mereka ke puncak jembatan hanya dalam satu menit. Perjalanan singkat ini menghadirkan sensasi kecepatan yang luar biasa, di mana setiap detik terasa mendebarakan. Saat elevator bergerak

naik, pemandangan di sekitar mulai terbuka perlahan, memberikan pengalaman visual yang menakjubkan sekaligus memacu adrenalin. Suara mekanisme elevator yang mendesing dan terpaan angin menambah sensasi menegangkan yang membuat pengalaman ini berbeda dari atraksi lain.

Sensasi kecepatan dan ketinggian ini menjadi pengalaman pertama bagi banyak pengunjung yang ingin merasakan adrenalin secara langsung. Naik ke puncak jembatan tidak hanya menantang keberanian, tetapi juga menawarkan panorama luas yang memukau, dari lanskap sekitar hingga horizon yang tak terbatas. Kombinasi antara ketegangan, kegembiraan, dan keindahan pemandangan membuat pengalaman naik elevator ini tak terlupakan dan meninggalkan kesan mendalam bagi siapa pun yang mencobanya.

Kafe di Ketinggian 800 Meter

Bagi pencinta suasana unik, tersedia sebuah kafe yang terletak 800 meter di atas sungai. Posisi kafe yang menjorok di atas jurang ini menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan kafe biasa, di mana pengunjung dapat menikmati udara segar dan pemandangan menakjubkan dari ketinggian yang ekstrem. Setiap sudut kafe dirancang untuk menghadirkan panorama yang memukau, menjadikan kunjungan ke

sini lebih dari sekadar menikmati minuman.

Menikmati secangkir kopi sambil menatap jurang yang dalam memberikan sensasi yang tak terlupakan. Suasana yang tenang namun dramatis membuat setiap tegukan terasa lebih istimewa, seolah setiap momen di kafe ini dipenuhi keajaiban alam. Kombinasi antara pemandangan yang spektakuler dan atmosfer unik membuat pengalaman di kafe ini menjadi memori yang sulit dilupakan bagi setiap pengunjung.

Ruang Observasi Kaca 1.000 m²

Jembatan ini juga dilengkapi dengan ruang observasi kaca yang luas, menawarkan pemandangan vertikal menakjubkan lebih dari 600 meter ke bawah. Lantai kaca yang transparan memungkinkan pengunjung melihat langsung jurang di bawah kaki mereka, menciptakan pengalaman visual yang dramatis dan memukau. Setiap sudut ruang observasi dirancang untuk memberikan panorama spektakuler, sehingga pengunjung dapat menikmati keindahan sekitar dari ketinggian yang ekstrem.

Dari titik ini, pengunjung bisa merasakan sensasi seolah melayang di udara. Perasaan tegang bercampur kagum membuat setiap momen di atas kaca terasa menegangkan sekaligus menyenangkan. Kombinasi antara keberanian, ketinggian, dan pemandangan luar biasa menjadikan

pengalaman di ruang observasi ini tak terlupakan dan memacu adrenalin setiap pengunjung yang mencoba.

Sky Balance Beam

Bagi pengunjung yang menyukai tantangan dan ingin menguji keberanian, tersedia wahana Sky Balance Beam. Wahana ini dirancang agar pengunjung dapat berjalan di atas balok sempit dengan jurang terbentang di bawahnya, memberikan sensasi ekstrem yang memacu adrenalin. Setiap langkah menuntut keseimbangan dan konsentrasi, menjadikan pengalaman ini lebih dari sekadar aktivitas fisik, tetapi juga uji nyali yang seru dan menantang.

Mengikuti Sky Balance Beam menghadirkan kombinasi unik antara olahraga ringan dan sensasi menegangkan. Saat menapaki balok dengan pemandangan jurang yang menakjubkan di bawah, pengunjung merasakan ketegangan yang bercampur kegembiraan.

Bungee Jumping

Atraksi bungee jumping menjadi salah satu daya tarik utama di jembatan ini, menarik pengunjung yang mencari sensasi ekstrem dan pengalaman penuh adrenalin. Dengan titik lompatan yang berada ratusan meter di atas sungai, wahana ini menawarkan sensasi terjun bebas yang luar biasa, di mana setiap detik terasa menegangkan. (nei,its/dya)



Dok, Kementerian BUMN ...dari hal 1

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin pengesahan revisi UU BUMN dalam rapat paripurna ke-6 tahun masa sidang I tahun sidang 2025-2026, Kamis (2/10/2025). Dalam rapat itu Dasco meminta persetujuan kepada anggota dewan usai Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini memaparkan laporan pembahasan RUU BUMN.

"Apakah RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Dasco di ruang sidang Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (2/10/2025).

Selepas itu, lantas fraksi-fraksi di DPR berseru memberikan tanggapan. "Setuju," kata mereka. Dasco pun mengetuk palu sidang.

Revisi ini dinilai membawa perubahan besar terhadap tata kelola BUMN yang selama ini menguasai layanan strategis publik, mulai dari listrik, BBM, pangan, hingga transportasi. Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menyebut revisi ini sebagai langkah penting untuk memastikan BUMN lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.

"Perbaiki tata kelola BUMN yang direalisasikan melalui RUU ini sangat relevan dan penting. BUMN bukan hanya harus menjadi entitas bisnis profesional dan menguntungkan, tetapi juga harus transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Anggia saat membacakan pidato dalam rapat paripurna.

Salah satu poin krusial yang disampaikan ialah larangan rangkap jabatan bagi Menteri maupun Wakil Menteri di direksi, komisaris, atau dewan pengawas BUMN. Dengan aturan ini, jelasnya, publik akan memperoleh jaminan keputusan strategis di BUMN tidak lagi dipengaruhi kepentingan politik atau konflik kepentingan.

Sebagai contoh, kebijakan harga BBM, tarif listrik, maupun investasi di sektor pangan akan lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, ia menyampaikan bahwa Kementerian BUMN kini berubah menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) yang hanya berperan sebagai regulator.

Perubahan ini, terangnya, dinilai penting agar fungsi pengawasan dan pengaturan dipisahkan dari bisnis, sehingga publik bisa berharap pada BUMN yang lebih profesional dan efisien, yang mana akan bekerja seperti perusahaan swasta besar namun tetap berorientasi pada pelayanan rakyat.

Selanjutnya, Anggia menegaskan

revisi UU ini juga bisa memperkuat peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit keuangan BUMN. Dampaknya, ujarnya, masyarakat bisa lebih yakin bahwa uang negara yang dikelola BUMN tidak disalahgunakan, sehingga potensi kerugian negara yang biasanya ditanggung rakyat lewat subsidi atau tarif bisa ditekan.

Poin lain yang tak kalah penting adalah kewajiban memperhatikan keseimbangan gender dalam jabatan direksi dan komisaris. Harapannya, UU BUMN baru ini akan lebih banyak membuka peluang bagi perempuan untuk duduk di posisi strategis BUMN, sekaligus memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan yang menyentuh layanan publik.

Dari sisi pelayanan, dirinya menekankan bahwa revisi UU ini akan membuat selaras dengan program prioritas pemerintah, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga hilirisasi industri. Publik, harapnya, bisa merasakan langsung dampak dalam bentuk pasokan pangan lebih stabil, energi lebih terjangkau, serta lapangan kerja baru dari hilirisasi sumber daya alam.

Mengakhiri pidatonya, Anggia menegaskan bahwa DPR dan pemerintah sepakat BUMN tidak lagi sekadar menjadi "perusahaan negara" yang rentan birokrasi, melainkan motor penggerak ekonomi yang sehat, efisien, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Ke depan, BUMN diharapkan berkontribusi maksimal pada ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, serta program strategis nasional lainnya yang akan berdampak langsung pada ekonomi rakyat," tutup Politisi Fraksi PKB itu.

Sebagai informasi, Pembahasan RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dimulai setelah Presiden mengirimkan surat resmi kepada DPR pada awal September 2025. Dalam surat itu, Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan bersama DPR.

Selanjutnya, berdasarkan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI pada 22 September 2025 memutuskan penugasan kepada Komisi VI DPR untuk membahas RUU tersebut bersama pemerintah. Komisi VI DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas secara intensif, termasuk menyerap masukan dari berbagai pihak.

Sejumlah pakar hukum dan akademisi dari berbagai universitas seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Udayana, Universitas

Negeri Semarang, Universitas Jember, Universitas Lampung, hingga STIH IBLAM ikut dilibatkan. Masukan-masukan itu menjadi pertimbangan penting untuk memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola BUMN.

Pada 26 September 2025, Komisi VI DPR RI bersama perwakilan pemerintah menggelar rapat kerja yang menjadi forum pembicaraan tingkat pertama. Dalam rapat itu, seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju terhadap substansi RUU, termasuk pengaturan larangan rangkap jabatan, perubahan nomenklatur Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur BUMN, serta penegasan peran BUMN sebagai penggerak ekonomi nasional.

Tahapan pembahasan kemudian berlanjut ke pembicaraan tingkat kedua dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 2 Oktober 2025. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini membacakan laporan hasil pembahasan, sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan seluruh anggota dewan untuk mengajukan RUU BUMN menjadi UU, yang mana memperoleh jawaban serentak "setuju", sehingga RUU Perubahan Keempat atas UU BUMN resmi disahkan menjadi undang-undang.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, berhadap perubahan ini membuat BUMN lebih lincah, efisien, dan fokus dalam menjalankan perannya sebagai regulator, tanpa kehilangan fungsi pengawasan negara.

"Dengan perubahan ini, penyelenggara BUMN bisa lebih gesit dalam pengambilan keputusan bisnis, tapi tetap diawasi oleh BPK maupun KPK," kata Rivqy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Ia menjelaskan, perbedaan mendasar antara kementerian dan badan terletak pada fungsi kelembagaannya. Kementerian cenderung birokratis dalam pengambilan keputusan, sementara badan dapat bekerja lebih cepat dan responsif. Namun, kewenangan pengawasan tetap ada, termasuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) hingga penetapan direksi.

"Badan tetap regulator. Sedangkan operator tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi tidak ada tumpang tindih, hanya model kelembagaannya yang diubah agar lebih efektif," ujar Legislator Fraksi PKB itu.

Menurut Rivqy, langkah ini sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo agar BUMN bisa melakukan perbaikan struktural dalam 2-3 tahun ke depan. DPR, melalui Komisi VI, berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi secara berkala agar transformasi ini benar-benar menghasilkan BUMN yang sehat, transparan, dan kompetitif.

"Jangan sampai perubahan hanya

sebatas bentuk kelembagaan. Harus ada output nyata berupa kinerja yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih kuat, dan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional," tegasnya.

Rivqy menambahkan, reformasi BUMN juga harus menjawab kritik publik yang menilai BUMN terlalu birokratis, boros, dan sarat konflik kepentingan. Dengan transformasi ke badan, diharapkan lahir tata kelola yang lebih modern, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Sementara itu, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan status Kementerian BUMN otomatis berubah setelah revisi UU ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Dia mengatakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menyiapkan proses transisinya.

Di samping itu, Supratman mengatakan Kepala Badan Pengaturan BUMN sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Supratman mengatakan saat ini tidak ada masalah apabila BUMN masih dipimpin Pelaksana Tugas Menteri BUMN Dony Oskaria. "Itu sepenuhnya tergantung sama Bapak Presiden siapa orang yang akan ditunjuk," kata Politikus Partai Gerindra itu setelah rapat dengan Komisi VI DPR dilansir tempo.

Ia mengatakan Badan Pengaturan BUMN tidak sama dengan Badan Pengelola Investasi Danantara. Menurut Supratman, BP BUMN akan menjadi regulator, sedangkan Danantara eksekutor. "Kalau ini (BP BUMN) fungsinya regulator," ujarnya.

Secara terperinci, Supratman menambahkan, kinerja dan aturan BP BUMN bakal diatur dalam Peraturan Presiden setelah revisi disahkan.

Direktur Next Indonesia Center, Herry Gunawan, mengatakan revisi UU BUMN ini masih meninggalkan catatan. Pertama, RUU BUMN hanya melarang menteri dan wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan pelat merah. Padahal, banyak pejabat eselon 1 yang juga masih merangkap jabatan.

"Banyak Eselon 1 yang saat ini jadi Komisaris di BUMN, padahal Eselon 1 itu berstatus penyelenggara negara atau regulator. Dengan demikian, terjadi konflik kepentingan, dan ini jelas tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," katanya pada Minggu (28/9/2025).

Herry yang juga pengamat BUMN itu mengatakan penetapan komisaris, direksi, dan pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara dan dapat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengubah peraturan sebelumnya. Sementara, BUMN dalam UU BUMN Nomor 1 Tahun 2025 adalah badan publik. "Klausul tersebut tidak terlihat ada perubahan. Ini menurut saya ada paradoks," ujarnya. (han,rls,ist/lut)

WAMEN DAHNIL DUGA ADA KEBOCORAN DANA HAJI RP5 TRILIUN

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menduga ada kebocoran anggaran dalam pelaksanaan ibadah haji yang mencapai Rp 5 triliun per tahun. Untuk itu Kementerian Haji dan Umrah menggandeng Kejaksaan Agung guna mengawal seluruh tahapan pengadaan.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menduga ada kebocoran anggaran dalam pelaksanaan ibadah haji yang mencapai Rp 5 triliun per tahun. Untuk itu Kementerian Haji dan Umrah menggandeng Kejaksaan Agung guna mengawal seluruh tahapan pengadaan.

Dukungan ini dinilai penting dalam memastikan proses berjalan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi atau pungutan liar. "Perintah Presiden jelas. Kami sangat membutuhkan bantuan Kejaksaan Agung. Tadi Prof. Reda (Jamintel) dan tim sudah menyatakan akan fokus membantu," jelasnya dikutip antara, Kamis (2/10/2025).

Lantas dari mana sebenarnya kebocoran anggaran yang mencapai triliunan tersebut. Dahnil menjelaskan hal bersumber dari keberangkatan jamaah. Indonesia memberangkatkan 203.000 jamaah haji pada tahun lalu dengan total biaya sekitar Rp17 triliun. Dari total dana tersebut, dia memprediksi ada sekitar 20-30% dana yang bocor.

"Kalau kebocoran 20% sampai 30% dari Rp17 triliun itu. berarti per tahun terjadi kebocoran hampir Rp 5 triliunan. Itulah yang hari ini ingin kami tekan semaksimal mungkin bila perlu nol kebocoran," tegas Dahnil, seperti dikutip dari DetikHikmah, Kamis (2/10/2025).

Lebih rinci, Dahnil menjelaskan, struktur biaya haji yang mencapai Rp17 triliun terbagi dalam 10 proses pengadaan utama. Komponen terbesar adalah transportasi udara, layanan syarikah, katering, dan akomodasi di Arab Saudi. Potensi kebocoran diperkirakan terjadi di seluruh tahapan tersebut.

Dahnil juga menyebut bahwa Kementerian Haji dan Umrah tidak lagi menggunakan banyak syarikah seperti pelaksanaan haji sebelumnya. Indonesia akan menggunakan dua syarikah yang telah berpengalaman melayani jamaah haji Indonesia.

Dia mengklaim efisiensi sektor syarikah mampu menekan biaya hingga 200 Riyal atau sekitar Rp850.000 per jamaah.

Menurut Dahnil, dengan menurunnya kebocoran dalam pengadaan, pemerintah dapat lebih



(Ilustrasi) Ibadah Haji (ist)

mudah menurunkan BPIH, meskipun secara finansial tantangan tetap besar karena fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar.

"Kalau dari sisi finansial, menekan BPIH itu sulit karena dolar naik. Tahun ini patokan kita sudah Rp16.500, sementara tahun lalu masih Rp16.000. Tapi bila kebocoran bisa ditekan, upaya menurunkan BPIH akan jauh lebih realistis," kata dia.

Ia menegaskan fokus utama pemerintah saat ini adalah membenahi tata kelola haji, khususnya dalam aspek transparansi pengadaan. Oleh karena itu, keterlibatan Kejaksaan Agung sangat dibutuhkan untuk mengawal proses reformasi tersebut.

"Kami ingin memastikan BPIH turun, sesuai arahan Presiden. Dan di situlah kami memohon peran aktif Kejaksaan Agung," kata dia.

Di satu sisi, KPK akan melakukan monitoring terhadap adanya dugaan kebocoran anggaran haji setiap tahunnya yang mencapai Rp 5 triliun. Monitoring ini dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya kebocoran tersebut.

"Dari sisi pencegahannya, kami di KPK itu ada Deputy Pencegahan dan Monitoring, Deputy Gahmon, di mana salah satunya ada Direktorat Monitoring," kata Plt Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan, dikutip Kamis (2/10/2025).

"Tentunya masalah haji ini juga sudah ada kajian-kajiannya dari Direktorat Monitoring. Dan nanti

dengan informasi yang diberikan, terkait dengan anggaran haji yang setiap tahun itu ada kebocoran sekitar 5 triliun, itu bisa dilakukan monitoring oleh Direktur Monitoring, dilakukan evaluasi," sambungnya.

Asep menjelaskan, dalam monitoring ini, tentunya akan ada evaluasi yang dilakukan. Hasil evaluasi tersebut nantinya diserahkan kepada pihak Kementerian Haji.

Dia menyebut evaluasi ini akan menasar titik-titik yang dianggap rawan terjadinya kebocoran. Dari hasil tersebut pun bisa dilakukan perbaikan untuk proses penyelenggaraan haji tahun berikutnya.

"Sehingga dalam pelaksanaan haji di tahun berikutnya, misalkan tahun 2026 dan seterusnya, kebocoran-kebocoran itu bisa diantisipasi, dibuatkan SOP-nya, atau mungkin juga kalau terjadi fraud oleh beberapa tempat atau beberapa orang atau beberapa kelompok," terang Asep.

Asep menjelaskan hasil monitoring ini juga nantinya bisa menasar ke arah penindakan jika memang ditemukan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi. Nantinya Deputy Penindakan yang akan bergerak melakukan penelusuran.

"Dan apabila hasil monitoring itu nanti ada ditemukan bahwa terjadi tindak pidana korupsi, itu bisa juga langsung disampaikan kepada penindakan, Kedeputan Penindakan untuk dilakukan penindakan," ungkap Asep.

"Jadi kita nanti bisa melakukan penindakan untuk perkara-perkara



Kalau kebocoran 20% sampai 30% dari Rp17 triliun itu. berarti per tahun terjadi kebocoran hampir Rp 5 triliunan. Itulah yang hari ini ingin kami tekan semaksimal mungkin bila perlu nol kebocoran,"

**Dahnil Anzar
Simanjuntak.**

Wakil Menteri Haji & Umrah

yang ditemukan pada saat dilakukan monitoring," sambungnya.

Di satu sisi, ICW melaporkan dugaan korupsi dana haji yang melibatkan pejabat Kementerian Agama ke KPK. Dugaan korupsi dana haji ini berkaitan dengan penyelenggaraan musim haji tahun 1446 H atau pada tahun 2025 M.

Total biaya manfaat yang dikeluarkan Kementerian Agama untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun 1446H/2025M sekitar Rp6,8 triliun. Pengelolaan ibadah haji yang dilakukan Kementerian Agama terdiri dari layanan masyair (pelaksanaan ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina), penyediaan katering, akomodasi, dan transportasi. Berdasarkan hasil investigasi, menemukan tiga permasalahan yang menimbulkan dugaan korupsi pada penyediaan layanan masyair dan katering.

Pertama, dalam memberikan layanan masyair bagi jamaah haji, patut diduga terdapat potensi persaingan usaha tidak sehat dalam pemilihan dan penunjukan penyedia. Potensi tersebut tercermin ketika tim penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk dua dari total delapan penyedia yang dimiliki oleh satu individu. Hal tersebut dibuktikan dari kesamaan nama dan kesamaan alamat. (han,ist/lut)